

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU JAGUNG DI KECAMATAN TIKKE RAYA KABUPATEN MAMUJU UTARA

Muhammad Alwi

Muhammadalwi969@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the implementation of Corn Integrated Crop Management Application Movement Policy in Tikke Raya District, North Mamuju Regency, West Sulawesi Province. The author used the theory of Edward III to determine the factors influencing the implementation of the policy, such as the factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used qualitative research, with descriptive method. Based on the results, it was concluded that Implementation of Corn Integrated Crop Management Application Movement Policy in Tikke Raya District North Mamuju Regency had been running well, this was evidenced by the theoretical approach of Edward III by looking at four (4) indicators, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The communication aspect in this program ran well so that the whole implementers and target groups knew their tasks and responsibilities. The resources needed were adequate, the disposition of the parties involved was very supportive for the smooth implementation of the policy. The bureaucratic structure had been structured well and technical guidelines also ran well, but coordination between the implementing agencies was still needed to be improved

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure*

Secara umum komoditi tanaman pangan merupakan komoditi yang sangat urgen dan strategis terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, karena komoditi tanaman pangan sebagian besar merupakan bahan pokok sebagai bahan pangan manusia. Sehingga komoditi tanaman pangan harus selalu tersedia secara kontiniu, terutama pada komoditi yang menjadi pangan pokok sebagian besar manusia seperti padi, gandum dan jagung.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya maka kebutuhan akan pangan terus meningkat pula, sehingga peningkatan produksi pangan harus terus dilakukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan permintaan akan produk pangan juga terus meningkat. Apabila produksi komoditi pangan rendah akan menimbulkan kerawanan pangan.

Jagung merupakan salah satu komoditi tanaman pangan yang memiliki peran penting dan strategis setelah padi, karena jagung banyak digunakan sebagai pangan (*food*),

Pakan (*feed*) dan bahan bakar (*fuel*). Kebutuhan akan jagung terus mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia kebutuhan jagung mengalami trend peningkatan baik digunakan untuk bahan pangan pokok dan industri pangan olahan, karena ada sebagian penduduk di Indonesia yang menjadikan jagung sebagai makanan pokok. Kebutuhan jagung sebagian besar berasal industri pakan terutama untuk ternak unggas, karena jagung merupakan salah bagian dari pakan utama dari ternak unggas, sementara jumlah penduduk yang terus meningkat ditambah dengan tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan gizi menyebabkan konsumsi daging ayam terus meningkat pula, hal ini akan berdampak pada permintaan akan jagung.

Meningkatnya permintaan jagung menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi pemangku kepentingan (*stake holders*),

terutama pada upaya peningkatan produksi jagung. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menetapkan sasaran swasembada secara berkelanjutan untuk tanaman jagung. Di Indonesia pengembangan budidaya jagung oleh petani masih memiliki banyak permasalahan antara lain penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, kualitas produksi, produktivitas lahan, indeks pertanaman, penanganan pasca panen dan pemasaran.

Kompleksnya permasalahan untuk mengembangkan jagung, menyebabkan peningkatan produksi jagung nasional untuk pencapaian swasembada berkelanjutan masih terkendala, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah terutama penanganan permasalahan baik dari hulu sampai hilir, selain itu faktor alam juga sangat mempengaruhi produksi jagung. Berdasarkan kondisi ini pemerintah telah banyak melakukan terobosan dalam rangka meningkatkan produksi jagung. Selain itu petani juga mempunyai peran penting untuk peningkatan produksi jagung terutama pada pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya dan penanganan pasca panen. Pengembangan jagung harus dilakukan dengan berbasis pada pengembangan teknologi tepat guna dari pemerintah.

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Nomor: 9/KPA/SK.310/C/I/2015, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yaitu Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) untuk mengembangkan komoditi tanaman pangan salah satunya adalah tanaman jagung, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman jagung, sehingga swasembada jagung secara berkelanjutan dapat tercapai, bahkan diharapkan Indonesia dapat melakukan ekspor jagung.

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung adalah suatu upaya pemerintah mengembangkan jagung secara terpadu, dengan mengembangkan jagung dalam satu kawasan dan manajemen,

kegiatan ini merupakan upaya yang sistematis dan simultan antara lain peningkatan luas tanam, peningkatan produktivitas, penurunan tingkat kehilangan hasil dan peningkatan kualitas mutu hasil.

Kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung yang digagas oleh Kementerian Pertanian merupakan kebijakan keberlanjutan dari program sebelumnya yang dianggap belum maksimal dan masih perlu mendapat inovasi baru yang lebih, guna mencapai target produksi nasional Tahun 2015 yaitu 20,31 juta ton. Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Terpadu, artinya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dilaksanakan dengan pendekatan satu kawasan dan satu manajemen, agar semua faktor-faktor produksi dapat dikelola bersama (tidak secara individual oleh petani) dalam satu manajemen yang efektif dan efisien bahkan sampai aspek pemasaran hasilnya.
2. Sinergis, artinya pengembangan jagung pada skala kawasan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya secara optimal.
3. Modern, artinya pengembangan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dengan cara budidaya modern melalui pemanfaatan kemajuan teknologi pertanian baik pra atau pasca panen.
4. Spesifik lokasi, artinya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung memperhatikan karakteristik lokasi untuk menentukan pilihan teknologi, varietas dan pola tanam.
5. Partisipatif, artinya Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung melibatkan partisipasi petani dan pemangku kepentingan.

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung tahun 2015 dilaksanakan di 26 Provinsi dan 166

Kabupaten/Kota, sedangkan Kabupaten Mamuju utara juga masuk dalam program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, karena Kabupaten Mamuju Utara adalah kawasan berbasis pertanian di Provinsi Sulawesi Barat juga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan tanaman jagung.

Di Kabupaten Mamuju Utara, Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dilaksanakan di 12 (dua belas) Kecamatan, dengan total luasan sebanyak 4.900 Ha, dengan jumlah kelompok tani yang terlibat sebanyak 202 kelompok tani. Kabupaten Mamuju Utara melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan yang menjadi *leading sector* pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, tentu wajib menjalankan kebijakan sesuai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung.

Keberhasilan Implementasi kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung untuk peningkatan produksi di Kabupaten Mamuju utara sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil pengamatan awal di lapangan terhadap pelaksanaan kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, salah satu kendala yang dihadapi di Kecamatan Tikke Raya adalah masih rendahnya kemampuan anggota kelompok tani yang terlibat pada kegiatan ini, dalam melaksanakan budidaya tanaman jagung sesuai dengan prinsip Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), sehingga target produksi jagung di Kecamatan Tikke Raya yaitu: 7 ton/ha, sedangkan realisasi di lapangan sebelum pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung hanya sebesar: 5 ton/ha, akan tetapi setelah pelaksanaan kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung maka produksi sebesar : 6,525 ton/ha. Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa

dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung Di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara”

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung Di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara.

Berdasarkan dengan masalah penelitian yang dirumuskan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung Di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi berguna bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya tentang implementasi kebijakan. Selain itu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar tentang penerapan Implementasi Kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung Di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara, sehingga menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dan menjadi referensi bagi bagi penulis dalam pelaksanaan tugas.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Penelitian ini akan di laksanakan di Kecamatan Tikke Raya, karena lokasi ini merupakan salah satu lokasi tempat pelaksanaan kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, sehingga lokasi ini layak untuk dijadikan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai dari tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2016. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Tanaman Pangan 1 (satu) orang.
2. Kepala Seksi Produksi 1 (satu) orang.
3. Penyulu Pertanian Lapangan (PPL) 1 (satu) orang.
4. Ketua Kelompok Tani 2 (Dua) orang

Jumlah informan pada penelitian ini adalah sebanyak 5 (Lima) orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Mamuju Utara dengan ibukota Pasangkayu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Barat atau pada bagian barat dari Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak pada posisi:

$0^{\circ} 40' 10'' - 1^{\circ} 50' 12''$ Lintang Selatan
 $119^{\circ} 25' 26'' - 119^{\circ} 50' 20''$ Bujur Timur

Kabupaten Mamuju Utara mempunyai batas wilayah:

Utara: Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Timur: Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Selatan: Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

Barat: Selat Makassar.

Kabupaten Mamuju Utara secara administrasi pemerintahan terbagi atas 12 kecamatan, terdiri dari 63 desa. Kecamatan Baras merupakan kecamatan terluas dengan luas 43.343 Ha atau 14,24 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil

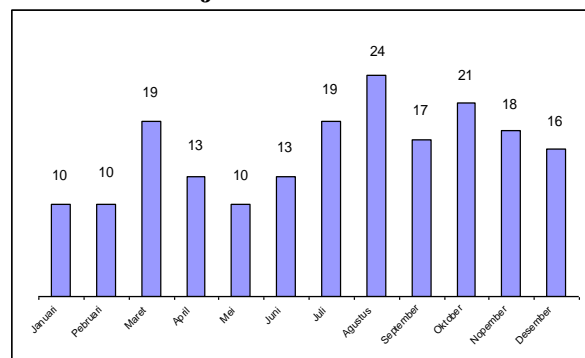
Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan wilayah pertanian juga banyak mengembangkan tanaman pangan seperti padi, jagung dan kacang-kacangan dengan luas dan

adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 3.011 Ha (0,69 %), dan secara total Kabupaten Mamuju Utara mempunyai luas wilayah 304.375 Ha

Jarak kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Duripoku, dengan ibukota Tammarunang, mempunyai jarak sekitar 101 km dari Pasangkayu, sedangkan kecamatan yang terdekat adalah Kecamatan Pedongga, ibu kota Malei mempunyai jarak sekitar 15 km dari Pasangkayu.

Kabupaten Mamuju Utara merupakan kawasan pertanian, karena didukung dengan kondisi geografis dan iklim yang ideal untuk pertumbuhan tanaman pertanian, hal ini terlihat dengan Total Curah hujan di Mamuju Utara berkisar antara 124 mm hingga 703 mm. Curah Hujan sebanyak 124 mm terjadi pada bulan Januari, sedangkan sebanyak 703 mm terjadi pada bulan Juli. Total Hari hujan pada tahun 2008 berkisar antara 10 hari hingga 24 hari tiap bulannya. Sepuluh hari hujan terjadi pada bulan Januari, Februari dan Mei, sedangkan 24 hari hujan terjadi pada bulan Agustus. Berikut ini adalah grafik total hari hujan di Mamuju Utara pada tahun 2008.

Grafik total curah hujan Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2008



Sumber : Bappeda Kabupaten Mamuju Utara, 2009.

produksi yang bervariasi. Tanaman jagung banyak dikembangkan baik sebagai tanaman pokok atau tanaman sela. Adapun data perkembangan komoditi tanaman pangan di Kabupaten Mamuju Utara sebagai berikut:

Tabel 1. Data perkembangan komoditi tanaman pangan di Kabupaten Mamuju Utara

No	Komoditi	2013		2014		2015	
		Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Padi	63.396	5,62	29.947	4,79	10.656	4,49
2.	Jagung	34.272	4,49	50.164	4,93	46.031	6,12
3.	Kedelai	4.108	1,21	2.055	1,25	1.916	1,41
4.	Kacang Tanah	538	4,39	328	3,91	452	2,21
5.	Ubi Kayu	2.329	10	263	9,39	195	15

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena tanpa komunikasi maka proses implementasi kebijakan dari hulu ke hilir tidak dapat berjalan sesuai perencanaan dan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan sangat tergantung pada pengetahuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses implementasi, karena jika ada pihak yang kurang mengetahui tugas dan tanggungjawabnya maka implementasi akan terganggu. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan.

Komunikasi yang efektif sangat ditentukan oleh faktor pemberi pesan, pesan itu sendiri dan penerima pesan, dimana ketiga faktor ini akan saling terkait dan menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat George C. Edward III yang mengemukakan bahwa komunikasi akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan agar dapat berjalan sesuai perencanaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan, tanggal 8 Agustus 2016 sebagai berikut:

“setelah kami mendapat informasi kalau Kabupaten Mamuju Utara dapat Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu

(GP-PTT) jagung, kami langsung mengadakan rapat dan mengundang penyuluh yang wilayahnya memiliki potensi sekaligus mensosialisasikan ke staf dan penyuluh program tersebut”

Dari hasil wawancara tersebut tergambar bahwa bidang tanaman pangan yang merupakan *leading sector* langsung melaksanakan komunikasi kepada seluruh *stake holders* yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, dengan tujuan bahwa setiap personil akan memahami tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Produksi tanaman pangan, tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :

“setelah mengetahui tahapan pelaksanaan kegiatan, maka kami langsung melakukan kunjungan kelapangan untuk melihat kondisi dan bertemu kelompok tani calon pelaksana dan mulai mensosialisasikan kepada mereka tentang Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung yang akan kita laksanakan”

Selain itu penulis melakukan wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Tikke Raya pada tanggal 22 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa:

“kami menyampaikan kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dengan melakukan kunjungan dan pertemuan di lokasi kelompok tani, untuk mensosialisasikan kegiatan dan persiapan yang harus dilakukan oleh kelompok tani”

Dari hasil wawancara tersebut tergambar bahwa komunikasi telah berjalan

pada Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung sampai ditingkat implementator dan bahkan sampai pada tingkat sasaran dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut George C. Edward III (1980), ada 3 (tiga) faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan publik yaitu: transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi adalah penyampaian pesan ataukah pengiriman pesan dari para pengambil keputusan kepada para pelaksana kebijakan, yang hendak melaksanakan kebijakan atau perintah atasan dalam rangka mensukseskan kegiatan atau program yang telah diputuskan. Kejelasan yang dimaksud bahwa pesan yang akan disampaikan harus jelas sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan konsistensi yaitu keputusan atau kebijakan itu harus dilaksanakan secara konsisten.

Hasil temuan pada penelitian ini terhadap hasil wawancara kepada ketua Kelompok Tani Bina Bersama (Syukur) tanggal 30 Agustus 2016, bahwa:

“petugas dinas dan PPL mengunjungi kelompok tani kami dan menyampaikan kepada kami mengenai Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, dan kami merespon kegiatan tersebut karena sangat bermanfaat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas jagung anggota kelompok tani”

Wawancara juga dilakukan kepada ketua kelompok tani Samaturu (M. Nasir) tanggal 7 September 2016, sebagai berikut :

“setelah mendapat informasi yang jelas dari petugas dinas mengenai Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, kami langsung rapat dengan seluruh anggota kelompok untuk mempersiapkan diri dalam mensukseskan program tersebut”

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan dan pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan, sumber daya meliputi personil, sarana dan prasarana yang digunakan dalam

mengimplementasikan kebijakan. Hal ini juga berlaku pada implementasi Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (1975:471) mengatakan bahwa sumber daya memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi. Dalam melaksanakan suatu kebijakan baik dalam organisasi publik maupun privat keberadaan sumber daya manusia sangat diperhitungkan. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, keberadaan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan.

Hasil temuan pada penelitian ini terhadap hasil wawancara kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan tanggal 8 Agustus 2016, bahwa:

“untuk menjalankan Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, kami menunjuk kepala seksi produksi dan staf serta melibatkan PPL dalam rangka membantu pendampingan kepada kelompok tani”

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok tani Samaturu (M. Nasir) Tanggal 7 September 2016, menyatakan bahwa:

“pada dasarnya kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung dapat kami laksanakan dengan baik karena personil yang terlibat baik dari dinas maupun PPL menguasai masalah pertanian khususnya jagung”

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh manajemen SDM dan kapasitas SDM yang terlibat baik pengambil keputusan maupun implementator. Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara penempatan staf sesuai dengan disiplin ilmu sangat menjadi prioritas dengan tujuan bahwa staf tersebut dapat menjalankan tugas dan

kewenangannya sesuai kemampuannya, selain pendidikan formal pegawai juga diberikan pendidikan informal (kursus, pelatihan dan bimtek) untuk meningkatkan kapasitasnya. Pelatihan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh manajemen kepegawaian dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kecakapan, keterampilan, keahlian atau mental pegawai untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan tertentu.

Selain itu menurut Sutikno dan Maryuni (2006), secara umum sumber daya dibagi menjadi 4 (empat) yaitu (1) sumber daya alam (*natural resources*), (2) sumber daya manusia (*human resources*), (3) sumber daya capital atau modal (*capital resources*), (4) manajemen (*management*). Seluruh sumber daya ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan guna mencapai tujuan organisasi. Gerakan Penerapan

Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah tidak terlepas dari seluruh sumber daya yang ada.

Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung membutuhkan ketersediaan sumber daya diantaranya sumber daya kapital (anggaran, sarana dan prasarana). Pada program ini sumber daya seperti anggaran telah disediakan oleh pemerintah, hal ini tentu mempermudah dalam pelaksanaan program.

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemerintah membenatu kelompok tani sebagai stimulan berupa bantuan dana untuk membiayai produksi tanaman jagung. Pemberian bantuan ini dilakukan setelah kelompok tani membuat rencana usaha kelompok (RUK), adapun rincian penggunaan anggaran pada kegiatan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung yaitu :

**RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)
Pelaksanaan Gerakan Penerapan
Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)**

Jumlah Anggota : 16 Orang
Komoditi : Jagung
Varietas : Nusantara

Nama Kelompok : Bina Bersama
Lokasi : Lariang
Luas Lahan : 25 Ha

Tabel 3. Rencana Usaha Kelompok (RUK)

No	Uraian	Jenis	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Benih	Nusantara	375 kg	49.000	18.375.000
2.	Pupuk Urea		2.500 kg	1.800	4.500.000
3.	Pupuk NPK		5.000 kg	2.300	11.500.000
4.	Pupuk Cair	Greenjos	125 liter	50.000	6.250.000
5.	Pestisida	Choloromite	50 liter	140.000	7.000.000
6.	Herbisida	Supretox	100 liter	65.000	6.500.000
7.	Pertemuan Kelompok		2 kali	162.500	325.000
Total					54.450.000

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang tanaman pangan tanggal 8 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa: “selain SDM yang memadai untuk pelaksanaan Program Gerakan Penerapan Pengelolaan

Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, pemerintah juga menyediakan anggaran untuk membantu petani untuk memperoleh saprodi, sehingga produksi dan produktivitas tanaman

jagungnya dapat meningkat dengan adanya program ini”

Melalui dukungan sumber daya yang memadai maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan lancar, hal ini sejalan pendapat Soeganda (1991:49) mengatakan bahwa “sumber daya organisasi mencakup (1) Modal yang berupa uang; dan (2) Material atau bahan baku, informasi, mesin-mesin, peralatan, perlengkapan, gedung kantor, waktu dan personel. Memperhatikan pernyataan Soeganda tersebut, bahwa sumber daya pertama adalah modal berupa uang, tentu sangat masuk akal karena tanpa uang muka organisasi sangat sulit untuk hidup apalagi berkembang, karena sebagian besar kehidupan organisasi memerlukan pembiayaan dalam bentuk modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional yang relatif besar. Hasil temuan pada penelitian ini setelah melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani bina bersama (Syukur) tanggal 30 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa:

“kami sangat bersyukur karena adanya Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, karena program ini menyediakan anggaran yang dikelola oleh petani untuk membeli sarana produksi yang dibutuhkan”

Mengamati hasil wawancara tersebut diatas sangat tergambar bahwa ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana untuk menjalankan kebijakan dan mencapai tujuan secara efektif dan efisien sangat diperlukan, hal ini senada pendapat George C. Edward III, yang menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas fisik untuk pelaksanaan kebijakan secara memadai sangat penting karena jika tidak tersedia maka kemungkinan implementasi kebijakan mengalami kegagalan.

Faktor disposisi (sikap/kecenderungan) merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan, baik disposisi ditingkat penentu kebijakan, implementator dan kelompok sasaran/target. Sikap atau respon dari setiap unsur yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan memberikan dampak yang

dapat positif atau bahkan dampak negatif. Oleh karena itu diharapkan disposisi seluruh elemen yang terkait mendukung dan memberikan respon untuk kelancaran implementasi kebijakan.

Hasil temuan pada penelitian ini berdasarkan wawancara dengan kepala seksi produksi tanggal 15 Agustus 2016, menyatakan bahwa:

“seluruh stake holders pada kegiatan ini memberikan dukungan yang baik, terutama dari pihak pimpinan yang memberikan respon yang tinggi, selain itu animo petani untuk melaksanakan kegiatan sangat tinggi, sehingga hal ini sangat membantu dalam kelancaran pelaksanaan”

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara yang kami lakukan kepada kelompok tani bina bersama (Syukur) tanggal 30 Agustus 2016, menjelaskan :

“kami sangat merespon kegiatan ini, karena kegiatan ini dapat meningkatkan produksi kami, dan pendampingan dari petugas dinas dan PPL sangat baik, sehingga kami tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas sudah menggambarkan bahwa disposisi masing-masing pihak sangat baik dalam mendukung implementasi kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, selain itu pemilihan lokasi di Kecamatan Tikke Raya juga turut mempengaruhi karena lokasi ini merupakan wilayah yang sesuai untuk pertanaman jagung dan banyak menjadi kegiatan petani.

Menurut George C. Edward III bahwa banyak kebijakan yang dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari para pelaksana kebijakan, namun kebijakan itu mungkin bertentangan langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana (Winarno, 2005).

Sikap dan kemampuan implementator dalam memahami tugas yang diemban, merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi program. Kepentingan untuk

mencapai tujuan organisasi merupakan kepentingan bersama yang harus diusahakan dengan memaksimalkan seluruh dukungan dari semua pihak. Sinergitas antara implementator dengan kelompok sasaran dalam melaksanakan kebijakan merupakan perpaduan yang ideal untuk pencapaian tujuan. Hal ini terbukti pada pelaksanaan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya, antara petugas dengan petani terjadi komunikasi yang efektif dan saling memberikan dukungan yang positif sehingga terjadi kerjasama yang produktif.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara terhadap kelompok tani Samaturu (M. Nasir) tanggal 7 September 2016, yang mengatakan bahwa :

“Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya, memberikan dampak yang sangat baik karena kami dapat menerapkan cara menanam jagung yang baik, setelah mendapat bimbingan dari petugas, sehingga produksi jagung kami dapat meningkat”

Implementasi kebijakan suatu organisasi sangat ditentukan oleh struktur organisasi itu sendiri, karena struktur organisasi akan membantu dalam efektivitas pencapaian tujuan, hal ini sejalan pendapat Thoha (2003), salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses diagnosa organisasi bagi pengembangannya adalah mendiagnosa struktur organisasi, apakah struktur internal yang dibangun benar-benar melayani tujuan organisasi dan pencapaian produktivitas kerja. Jika struktur organisasi dan tujuannya tidak sesuai dengan tujuannya, ini berarti bahwa antara struktur organisasi dan tujuannya tidak selaras.

Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi dan saling terkait, dalam beberapa hal menunjukkan tingkat-tingkat spesialisasi, hirarki, wewenang dan hubungan. Struktur organisasi merupakan

gambaran bagaimana perangkat organisasi itu bekerja dalam mengimplementasikan kebijakan, dengan menyusun struktur dan memanfaatkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Geroge C. Edward III berpendapat mengenai struktur birokrasi lebih menekankan pada hubungannya dengan implementasi kebijakan, bahwa dalam struktur birokrasi ada dua karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau *Standart Operational Procedure (SOP)* dan fragmentasi yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas, sumber-sumber dari pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi seperti komite-komite, legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Suatu kebijakan yang telah diputuskan untuk diimplementasikan baik dalam bentuk program atau kegiatan, maka sangat diperlukan standar dan aturan dalam pelaksanaan. Aturan ini akan menjadi pedoman kepada seluruh implementator dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga berjalan sesuai dengan perencanaan. Setiap birokrasi pemerintahan yang menjalankan kebijakan akan memiliki aturan masing-masing yang menjadi standar dan acuan kerja, standar ini dapat berbentuk SOP, pedoman atau petunjuk teknis/pelaksanaan. Pedoman ini akan menjadi indikator dan bahan evaluasi, apakah implementasi kebijakan dan kerja organisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, yang merupakan salah satu kebijakan dalam bidang pertanian, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman jagung, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani. GP-PTT jagung ini adalah program yang dibiayai melalui APBN dan dijalankan oleh pemerintah

daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara. Kegiatan ini memiliki pedoman teknis dan petunjuk teknis yang akan menjadi acuan pelaksanaan. Pedoman dan petunjuk teknis ini akan menjadi regulasi dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh para implementator, sehingga kegiatan ini mencapai tujuan sesuai yang direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Tanaman Pangan tanggal 8 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa:

“acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu pedoman teknis dari pusat, kemudian dilanjutkan melalui petunjuk teknis, yang harus dilaksanakan sesuai prosedur yang tertuang dalam pedoman teknis. Oleh karena itu seluruh staf yang terlibat dalam kegiatan ini harus mengetahui dan memahami isi pedoman teknis”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan ini memiliki standar yaitu berupa pedoman teknis yang menjadi acuan pelaksanaan, jika mengamati hasil wawancara terlihat bahwa SKPD memiliki itikad baik dalam menjalankan program ini, hal ini merupakan langkah yang sangat baik sehingga para implementator dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Hasil temuan peneliti dari wawancara dengan kepala seksi produksi tanggal 15 Agustus 2016, mengenai hambatan dari pelaksanaan kegiatan yaitu :

“kendala yang dihadapi yaitu antara petugas teknis dinas dan PPL berada dalam organisasi yang berbeda, sehingga koordinasi masih menjadi kendala dalam pendampingan dan

pembinaan, selain itu kelembagaan dari kelompok tani yang masih membutuhkan pembinaan baik dari segi teknis maupun administrasi pengelolaan bantuan”

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan SKPD *leading sector* dalam pelaksanaan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan dibutuhkan kerjasama antara petugas dinas dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani penerima bantuan. Temuan di lapangan bahwa antara petugas dinas dan PPL berada dalam naungan organisasi yang berbeda. Hal ini mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan di lapangan terutama masalah koordinasi.

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan bukan sekedar terlihat dari sejauhmana proses implementasi kebijakan tersebut, akan tetapi yang menjadi indikator adalah bahwa apabila kebijakan itu dilaksanakan sesuai rencana maka akan menimbulkan dampak positif. Hal ini juga berlaku pada pelaksanaan kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya, dengan melihat bahwa selain meningkatkan kemampuan petani juga memberikan dampak pada peningkatan produktivitas pertanaman jagung. Adapun data perbandingan produktivitas tanaman jagung berdasarkan kelompok tani sebelum dan sesudah Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya yaitu :

Tabel 4. Data Produksi dan Produktivitas sebelum dan sesudah pelaksanaan GP-PTT jagung di Kecamatan Tikke Raya

No.	Nama Kelompok	Luas Lahan (Ha)	Sebelum GP-PTT		Sesudah GP-PTT	
			Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1.	Bina Bersama	25	138	5,2	170	6,8
2.	Samaturu	25	125	5,0	167,5	6,7
3.	Sipatturu	25	125	5,0	155	6,2
4.	Cari Berkah	25	127,5	5,1	157,5	6,3
5.	Jembatan Reski	25	127,5	5,1	162,5	6,5
6.	Malise	25	125	5,0	162,5	6,5
7.	Sirennuang	25	125	5,0	165	6,6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif, diperoleh kesimpulan yaitu: Implementasi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara telah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pendekatan teori Edward III dengan melihat 4 (empat)

indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi dalam kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga seluruh implementator dan kelompok sasaran mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang dibutuhkan telah memadai akan tetapi masih perlu peningkatan terutama masalah sarana dan prasarana produksi. Disposisi para pihak yang terlibat sangat mendukung untuk kelancaran implementasi kegiatan. Struktur birokrasi telah tersusun

dengan baik dan pedoman teknis juga dijalankan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan koordinasi antar pihak pelaksana terutama koordinasi antara penyuluh dengan petugas dinas yang masih perlu ditingkatkan. Pelaksanaan kebijakan Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) jagung di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi dan produktivitas tanaman jagung.

Rekomendasi

Untuk pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan, dengan ini peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pengembangan ilmu administrasi sebaiknya dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lain.
2. Penggunaan teori Edward III pada kebijakan pemerintah yang lain.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman

Terpadu (GP-PTT) jagung atau program yang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Hasbullah, M.Si, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Tadulako bersama jajarannya dan Dr. Nurhannis, M.Si, Anggota tim pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan masukan dengan kesabaran dan kebijaksanaan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Nomor: 9/KPA/SK.310/C/I/2015 tentang Pedoman Teknis Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi dan Jagung. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Soeganda, Riyatna, 1991. *Motivasi, Partisipasi dan Pembangunan*. U. K. Press, Jakarta.
- Sutikno dan Maryunani, 2006. *Ekonomi Sumberdaya Alam*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Thoha, Miftah, 1980. *Administrasi Kepegawaian Daerah*. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Politik, UGM.
- Van Meter, Donal S. and Carl E. Van Horn, 1975. *The Policy Implementation Process: a Conceptual Framework*. London: Sage Publications Inc.
- Winarno Budi, 2005. *Kebijakan Publik dan Proses*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.